

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

- Anwar. et al. (2021). *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- C.S.T . Kansil. 2014. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Arya Utama. 2007 *Hukum Lingkungan*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Ismail Nurdin. 2017. *Etika Pemerintahan*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.
- Juniarso Ridwan dan achmad Sodik Sudrajat. (2019). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Lukman Santoso. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lutfi Effendi. 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Malang: Bayumedia Sakti Group.
- Muhadam Labolo. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- M. Ryaas Rasjid. 1998. *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Mexasai Indra. Oksep Adhayanto dan Pery Rehendra Sucipta. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nitaria Angkasa et al. (2019). *Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar. Lex Privatum*. Lampung: CV. Laduny alifatama.
- Riawan Tjandra. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Universitas Atma Jaya,.Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Urip Santoso. 2014. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana.

- Vera Rimbawani Sushanty. 2020. *Hukum Perizinan*. Surabaya: UBAHARA Press.
- Yusri Munaf. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembetulan*. Yogyakarta: CV. Penerbit ANDI offset.

## **SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa dan Rumah.

## **SUMBER LAINNYA**

- Agung Nurrahman, (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memelihara Ketertarikan Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Penanganan Penyebaran Virus Covid 19 Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Tatapamong* 2, no. 1: 1–16, Diakses pada 20 November 2023. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1232>.
- Dadi Rosadi dan Febi Oktarista Andriawan. (2016). Aplikasi Sistem Informasi Pencarian Tempat Kos di Kota Bandung Berbasis Android, *Jurnal Computech & Bisnis*. 10 (1).
- Fungsi kost pengertian mahasiswa pendapatan. tersedia di: [http://textid.123dok.com/dokument/7q025j0xy-fungsi-kost-pengertian-mahasiswa-pendapatan](http://textid.123dok.com/dokument/7q025j0xy-fungsi-kost-pengertian-mahasiswa-pendapatan.html).html (1 April 2024).
- Inayah Hidayati, (2021). Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7 no. 2 : 212. Diakses 19 November 2023. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40517>.

Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 10 (1). 2527-4295. Diakses pada 30 Maret 2023. Doi: <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/3587/2276/>

Suko Prayitno. (2017). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. *iJurnal Surya Kencana Satu*, 8 (2), 698-1179. Diakses pada 1 April 2024. Doi: <https://jdihn.go.id/files/729/698-1179-1-SM.pdf>.

“Sejarah kos-kosan” (On-line), tersedia di : <https://www.kostindekost.com/tag/sejarahkos-kosan/>, diakses tanggal (1 april 2024).